

Optimalisasi Open Government Data melalui Platform "Satu Data" di Kota Pekanbaru

Authors:

Dini Permata Indah¹, M. Rafi²

e-Mail:

dini.permata0990@student.unri.ac.id, rafiy060611@lecturer.unri.ac.id

Affiliation:

Universitas Riau, Indonesia^{1,2}

Received : Jan, 13, 2026

Revised : Jan 26, 2026

Accepted : Mei 04 ,2026

Available Online: Juni 30, 2026

Corresponding author

Dini Permata Indah

Universitas Riau

dini.permata0990@student.unri.ac.id

Abstract

The implementation of Open Government Data (OGD) constitutes an integral part of the public governance reform agenda that emphasizes transparency, accountability, and public participation. In this context, the Government of Pekanbaru City has adopted the One Data policy as a platform for the integration and dissemination of data across local government agencies. However, the extent to which OGD principles have been optimized through this platform in local governance practice remains an issue that requires further examination. Therefore, this article aims to analyze the level of OGD optimization. This study employs a descriptive qualitative method through a literature review by examining policy documents, scholarly publications, and official information from the local government. The findings indicate that the Government of Pekanbaru City has established a foundational framework for OGD through regulatory arrangements, the development of a data portal, and efforts to strengthen human resource capacity. Nevertheless, the optimization of OGD has not yet been fully achieved, as evidenced by limited data interoperability, inconsistent data updates, and low levels of public data utilization. The scientific novelty of this article lies in its empirical analysis, which not only assesses the existence and availability of data but also examines the degree of operationalization of OGD elements in supporting transparency, inter-agency coordination, and the utilization of data in the formulation and evaluation of public policies in Pekanbaru City. Based on these findings, it can be concluded that OGD optimization in Pekanbaru City remains at the stage of institutional strengthening and has not yet reached an optimal level, thereby requiring further strategic efforts to enhance the quality and value of public data.

Keywords: e-government; data interoperability; human resource capacity; open government data; satu data

Abstrak

Implementasi Open Government Data (OGD) merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mengadopsi kebijakan Satu Data sebagai platform integrasi dan diseminasi data lintas perangkat daerah. Namun, sejauh mana prinsip OGD dioptimalkan melalui platform tersebut dalam praktik pemerintahan lokal masih perlu dikaji. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat optimalisasi OGD tersebut, penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan menelaah dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, dan informasi resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah membangun fondasi OGD melalui kerangka regulasi, pengembangan portal data, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, optimalisasi OGD belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan keterbatasan interoperabilitas data, inkonsistensi pembaruan, serta rendahnya pemanfaatan data oleh publik. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis empiris yang tidak hanya menilai keberadaan dan ketersediaan data, tetapi juga mengkaji tingkat operasionalisasi elemen OGD dalam mendukung transparansi, koordinasi antar perangkat daerah, serta pemanfaatan data dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik di Kota Pekanbaru. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi OGD di Kota Pekanbaru masih berada pada tahap penguatan institusional (belum optimal) dan memerlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna data publik.

Keywords: e-government; interoperabilitas data; kapasitas sumber daya manusia; open government data; satu data

PENDAHULUAN

Open Government Data (OGD) di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan transformasi digital yang dilembagakan melalui kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, OGD diposisikan tidak hanya sebagai instrumen transparansi, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Hasnita & Salomo, 2025). Namun, berbagai kajian nasional menunjukkan bahwa implementasi OGD di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan institusional yang cukup kompleks. Secara umum, keterbukaan data pemerintah masih didominasi oleh pendekatan kepatuhan regulatif, di mana publikasi data lebih diarahkan untuk memenuhi kewajiban administratif dibandingkan mendorong pemanfaatan data secara substantif. Fragmentasi tata kelola data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, ketimpangan kualitas metadata, serta belum seragamnya standar interoperabilitas menjadi persoalan utama yang menghambat integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan data, analisis data, dan pemanfaatan teknologi informasi masih relatif terbatas, terutama di luar institusi pusat (Danu, 2025).

Tidak hanya tantangan struktural dan kelembagaan, fenomena nasional implementasi OGD di Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi di tingkat operasional. Meskipun kebijakan Satu Data Indonesia telah menetapkan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, penerapannya di banyak instansi pemerintah masih bersifat parsial dan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam proses kerja birokrasi. Akibatnya, praktik pengelolaan data sering kali masih bergantung pada inisiatif sektoral, dengan tingkat konsistensi pembaruan data yang rendah dan belum terintegrasi secara sistematis antar unit

kerja. Fenomena lain yang mengemuka secara nasional adalah dominasi orientasi teknokratis dalam pengembangan OGD, yang mana keberhasilan sering diukur dari keberadaan portal data dan jumlah dataset yang dipublikasikan, bukan pada sejauh mana data tersebut dimanfaatkan dalam siklus kebijakan publik. Pendekatan ini menyebabkan OGD cenderung diposisikan sebagai output administratif, bukan sebagai instrumen strategis dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Padahal, tanpa mekanisme umpan balik dan pemanfaatan data yang jelas, keterbukaan data berisiko menjadi simbolik dan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Aditio et al., 2025). Di samping itu, koordinasi antar aktor dalam ekosistem OGD nasional masih menghadapi kendala. Peran wali data, produsen data, dan pembina data belum sepenuhnya berjalan secara optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lemahnya mekanisme pengawasan dan insentif terhadap kualitas data menyebabkan variasi mutu data antar sektor dan wilayah menjadi sangat lebar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap data pemerintah sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan publik, baik oleh internal birokrasi maupun oleh pemangku kepentingan eksternal (Eldo, 2025).

Keterbukaan data pemerintah menjadi indikator penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan data publik sebagai sumber daya strategis bagi pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemilik tunggal data, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas penyediaan data yang dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya (Hidayat, 2025). *Open Government Data* (OGD) berkembang sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perumusan serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital, penerapan OGD di tingkat pemerintah daerah menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Khaerani & Samsu, 2025).

Perkembangan kajian OGD menunjukkan pergeseran fokus dari keterbukaan informasi menuju pemanfaatan data sebagai aset publik yang berdampak pada kualitas kebijakan. Wirtz et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan OGD ditentukan oleh keterpaduan regulasi, kapasitas teknologi, serta kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah. Pada praktiknya, implementasi OGD di pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai fenomena struktural, antara lain fragmentasi data antar organisasi perangkat daerah, ketimpangan kualitas metadata, serta keterbatasan mekanisme pemanfaatan data oleh publik. Kondisi tersebut menyebabkan data terbuka belum sepenuhnya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik yang berbasis bukti. Secara analitis, persoalan ini menunjukkan lemahnya *data governance* yang ditandai oleh absennya standar operasional lintas organisasi dan rendahnya koordinasi institusional, sehingga data diproduksi sebagai output administratif, bukan sebagai input strategis kebijakan. Selain itu, minimnya literasi data di kalangan aparatur dan masyarakat membatasi proses *knowledge translation*, yaitu transformasi data mentah menjadi informasi yang relevan bagi perumusan kebijakan. Akibatnya, potensi OGD sebagai instrumen *evidence-based*

policymaking dan inovasi kebijakan belum termanfaatkan secara optimal, serta cenderung menjadikan OGD sebagai kebijakan prosedural yang belum menghasilkan dampak substantif terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik.

Fenomena serupa terlihat dalam berbagai studi empiris di sejumlah kota di Indonesia. Penelitian Wachid et al., (2024) menunjukkan bahwa OGD di Kota Surabaya berperan dalam mendukung agenda *Smart City* melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun pemanfaatannya belum berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan publik akibat rendahnya literasi data masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi OGD dalam kerangka *Smart City* masih bersifat teknokratis dan berorientasi pada penyediaan infrastruktur digital, belum sepenuhnya mendorong transformasi tata kelola berbasis data (*data-driven governance*). Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara dimensi teknologi dan dimensi sosial-institusional, di mana ketersediaan data tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas partisipasi publik dan kebijakan. Lemahnya koordinasi antarinstansi juga menegaskan absennya mekanisme *whole-of-government* dalam pengelolaan data, sehingga OGD belum mampu berfungsi sebagai *shared knowledge base* bagi perumusan kebijakan lintas sektor. Akibatnya, OGD lebih berperan sebagai instrumen legitimasi kebijakan *Smart City* dibandingkan sebagai fondasi substantif bagi pengambilan keputusan publik yang partisipatif dan berbasis bukti.

Kajian Wijaya et al. (2025) di Kota Denpasar menemukan bahwa implementasi OGD telah didukung oleh kerangka regulasi dan platform digital, tetapi kualitas dan keabsahan data pada beberapa sektor masih menjadi persoalan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan OGD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan teknologi, melainkan sangat bergantung pada mekanisme penjaminan mutu data (*data quality assurance*) yang mencakup akurasi, konsistensi, keterbaruan, dan validitas sumber data. Secara konseptual, rendahnya kualitas data menunjukkan lemahnya tata kelola data sektoral serta belum optimalnya peran produsen data dalam menerapkan standar metadata dan proses verifikasi yang sistematis. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik (*public trust*), karena data yang tidak reliabel berpotensi menciptakan asimetri informasi dan menurunkan legitimasi kebijakan yang berbasis OGD. Dengan demikian, tanpa penguatan kontrol kualitas dan akuntabilitas produsen data, OGD berisiko tereduksi menjadi instrumen formal keterbukaan yang justru kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan transparansi dan kualitas kebijakan publik.

Berbeda halnya dengan penelitian Ode et al. (2022) yang mengungkap bahwa Portal *Jakarta Open Data* telah memperluas akses dan partisipasi masyarakat, namun ketimpangan kapasitas pengelolaan data antar perangkat daerah masih membatasi optimalisasi OGD sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa inklusivitas akses data tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung agenda pembangunan. Secara konseptual, ketimpangan kapasitas antar perangkat daerah menunjukkan masalah *institutional readiness* dan belum meratanya kemampuan teknis serta komitmen organisasi dalam mengintegrasikan data ke

dalam siklus perencanaan dan evaluasi kebijakan. Akibatnya, OGD belum sepenuhnya berfungsi sebagai *cross-sectoral enabler* yang mampu menghubungkan data lintas sektor untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa strategi penguatan kapasitas yang terkoordinasi dan mekanisme integrasi data lintas organisasi, pemanfaatan OGD cenderung terfragmentasi dan lebih berdampak pada peningkatan transparansi dibandingkan pada transformasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

Temuan-temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Risky et al. (2025) di Kota Bandung yang menegaskan bahwa meskipun regulasi dan infrastruktur teknologi telah tersedia, orientasi data terbuka masih cenderung bersifat administratif dan akademik, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan data relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya *implementation gap* antara tujuan normatif kebijakan OGD sebagai instrumen demokratisasi data dengan praktik birokrasi yang masih berorientasi pada kepatuhan formal (*compliance-based implementation*), bukan pada penciptaan nilai publik (*public value creation*). Selanjutnya, Mulyanto et al. (2022) menekankan bahwa implementasi OGD di Indonesia secara umum masih menghadapi kendala kelembagaan, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta rendahnya literasi data publik, yang berdampak pada belum optimalnya kontribusi OGD terhadap efektivitas pelayanan publik dan kualitas kebijakan. Secara konseptual, kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan OGD tidak semata ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan teknologi, melainkan sangat bergantung pada kapasitas aktor implementor, budaya organisasi yang mendukung keterbukaan, serta ekosistem kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa transformasi institusional dan penguatan kapasitas pemanfaatan data, OGD berpotensi terjebak sebagai kebijakan simbolik (*symbolic policy*) yang minim dampak substantif terhadap tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian OGD di tingkat pemerintah daerah sebagian besar menekankan aspek ketersediaan data, regulasi, dan infrastruktur, sementara analisis mengenai optimalisasi OGD sebagai instrumen yang terintegrasi dengan sistem pengambilan keputusan kebijakan publik masih terbatas. Selain itu, studi-studi terdahulu belum secara spesifik membandingkan praktik operasionalisasi OGD antar kota dalam konteks implementasi kebijakan Satu Data sebagai kerangka nasional pengelolaan data pemerintah daerah. *Research gap* pada penelitian ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam menilai kontribusi OGD terhadap dampak kebijakan publik yang terukur, sebagaimana menjadi salah satu indikator penilaian mutu publikasi ilmiah bereputasi nasional.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini menempatkan Kota Pekanbaru sebagai studi kasus untuk menganalisis optimalisasi OGD melalui platform Satu Data dengan merujuk pada praktik implementasi OGD di kota-kota lain di Indonesia. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis empiris yang tidak hanya menilai keberadaan dan ketersediaan data, tetapi juga mengkaji tingkat operasionalisasi elemen OGD dalam mendukung transparansi, koordinasi antar perangkat daerah, serta pemanfaatan data dalam proses

perumusan dan evaluasi kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini berfokus pada pertanyaan bagaimana optimalisasi OGD melalui platform Satu Data di Pemerintahan Kota Pekanbaru? Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tingkat optimalisasi *OGD* di Kota Pekanbaru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara sistematis konsep, kebijakan, dan praktik implementasi *OGD* melalui platform Satu Data di Kota Pekanbaru berdasarkan sumber-sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer dan sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi dan Satu Data Indonesia, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah (Adinegoro et al., 2025). Data pendukung diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan klasifikasi literatur yang relevan dengan fokus kajian *OGD* dan implementasinya di tingkat pemerintah lokal. Literatur yang digunakan dianalisis berdasarkan kesesuaian tema, kedalaman pembahasan, serta kontribusinya dalam menjelaskan aspek kerangka hukum, sistem portal data, dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah (Arsyi et al., 2024). Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan konseptual dan empiris dari berbagai sumber literatur (Lyhne et al., 2025). Kerangka teori *Open Government Data* sebagaimana dikemukakan oleh Wirtz et al. (2018) dan Rahmat et al. (2019) digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai sejauh mana optimalisasi *OGD* melalui platform Satu Data di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

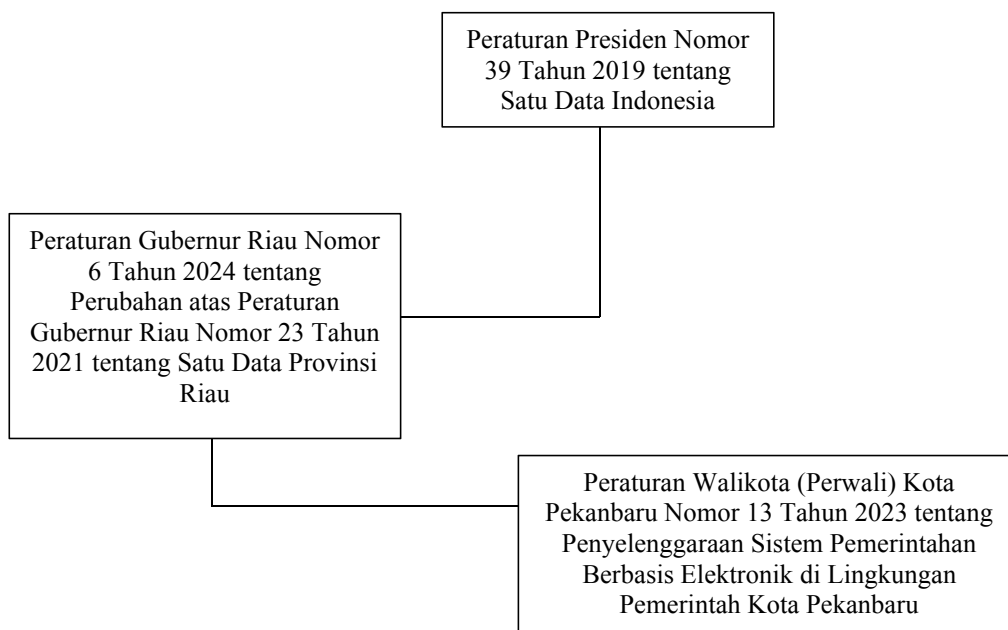
Implementasi *OGD* melalui kebijakan Satu Data Pekanbaru menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan infrastruktur digital belum secara otomatis menghasilkan keterbukaan data yang substantif (Zulfa & Afandi, 2023). Temuan ini menguatkan pandangan dalam literatur *OGD* yang menegaskan bahwa keterbukaan data bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan tata kelola (*data governance*) yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia (Rahman et al., 2024).

Berdasarkan konteks tersebut, implementasi *OGD* di Kota Pekanbaru dikaji dengan menggunakan Teori *Open Government Data* oleh Rahmat et al. (2019) dengan tiga indikator utama, yaitu pedoman dan kerangka hukum (*legal guidelines and frameworks*), kemampuan sistem portal web (*the ability of the web portal system*) dan kemampuan serta sikap pemerintah terhadap sumber daya manusia (*government human resources capabilities and its attitude*). Kerangka analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik Satu Data telah dioptimalkan dalam mendukung keterbukaan data dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

1. Pedoman dan Kerangka Hukum (*Legal Guidelines and Frameworks*)

Secara normatif, Satu Data Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diturunkan langsung dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan diperkuat oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2024. Dalam perspektif teori OGD, keberadaan regulasi ini memenuhi dimensi *institutional readiness*, yakni prasyarat formal agar data dapat dikelola secara terstandar dan terbuka. Pedoman dan Kerangka Hukum (*Legal Guidelines and Frameworks*) Satu Data yang berlaku di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan 1 di bawah ini.

Bagan 1. Kerangka Regulasi Satu Data yang Berlaku di Kota Pekanbaru



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Bagan 1 di atas menunjukkan bahwa dalam kerangka regulatif tersebut, Satu Data Pekanbaru diposisikan bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang mengikat seluruh perangkat daerah. Pedoman hukum yang berlaku mengatur secara eksplisit pembagian peran antara produsen data, walidata, dan pembina data, sekaligus menetapkan kewajiban setiap perangkat daerah untuk mengikuti standar data, metadata, serta kode referensi yang seragam. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah praktik pengelolaan data yang bersifat sektoral, tumpang tindih, dan tidak sinkron, yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan keterbukaan data di tingkat lokal (Lao, 2019).

Kerangka hukum Satu Data Pekanbaru juga mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data sebelum dipublikasikan melalui portal data pemerintah daerah. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas data agar informasi yang disajikan kepada publik bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

(Emigawaty & Syafrianto, 2024). Dengan demikian, aspek regulatif tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal kebijakan keterbukaan data, tetapi juga sebagai alat kontrol administratif dalam menjamin konsistensi dan integritas data lintas perangkat daerah (Dytihana et al., 2025). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik birokrasi sehari-hari. Kepatuhan perangkat daerah terhadap standar data, metadata, dan kode referensi masih rendah dan tidak merata. Kondisi ini menunjukkan adanya *implementation gap* khususnya pada aspek komunikasi kebijakan dan kapasitas pelaksana (Wattimena et al., 2025). Fenomena serupa juga ditemukan oleh Wachid et al. (2024) di Kota Surabaya dan Ode et al. (2022) di DKI Jakarta, di mana regulasi OGD telah tersedia tetapi belum diikuti oleh koordinasi lintas instansi yang optimal. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap penerapan standar data, metadata, dan kode referensi dalam Satu Data Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Satu Data Pekanbaru Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Standar Kepatuhan			
		Menerapkan Standar Data	Menggunakan Metadata	Menggunakan Kode Referensi Baku	Belum Memenuhi Standar
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	✓
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	✓	-	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	✓
4	Badan Pendapatan Daerah	✓	✓	-	-
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	✓
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	✓
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	✓
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	✓
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	✓	✓	-	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	✓
11	Dinas Kesehatan	✓	✓	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	✓
13	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	-	✓
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	✓	✓	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	-	✓
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	✓
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	✓
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	✓	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	✓
20	Dinas Pendidikan	✓	✓	-	-
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓	✓	-	-

22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓	-	-
23	Dinas Perhubungan	✓	✓	-	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	✓
25	Dinas Pertanahan	-	-	-	✓
26	Dinas Pertanian dan Perikanan	-	-	-	✓
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	✓
28	Dinas Sosial	✓	✓	-	-
29	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	✓
30	Inspektorat	-	-	-	✓
31	Kecamatan Bina Widya	-	-	-	✓
32	Kecamatan Bukit Raya	-	-	-	✓
33	Kecamatan Kulim	-	-	-	✓
34	Kecamatan Lima Puluh	-	-	-	✓
35	Kecamatan Marpoyan Damai	-	-	-	✓
36	Kecamatan Payung Sekaki	-	-	-	✓
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-	-	✓
38	Kecamatan Rumbai	✓	✓	-	-
39	Kecamatan Rumbai Barat	-	-	-	✓
40	Kecamatan Rumbai Timur	-	-	-	✓
41	Kecamatan Sail	-	-	-	✓
42	Kecamatan Senapelan	✓	✓	-	-
43	Kecamatan Sukajadi	-	-	-	✓
44	Kecamatan Tenayan Raya	-	-	-	✓
45	Kecamatan Buah Madani	-	-	-	✓
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	✓
47	Sekretariat Daerah	-	-	-	✓
48	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	✓
Jumlah		11	13	0	35

Sumber: Satudata.pekanbaru.go.id, 2025

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap standar Satu Data Pekanbaru masih belum merata, di mana hanya sebagian kecil perangkat daerah yang telah menerapkan standar data dan menggunakan metadata secara konsisten, sementara tidak satu pun yang sepenuhnya menggunakan kode referensi baku, dan sebagian besar masih berada pada kategori belum memenuhi standar. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antarperangkat daerah yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta prioritas kerja masing-masing perangkat daerah, sehingga kepatuhan terhadap standar Satu Data yang telah ditetapkan belum dapat diwujudkan secara seragam di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum sepenuhnya menjamin tercapainya integrasi data yang optimal, sehingga diperlukan

penguatan koordinasi, pengawasan, dan internalisasi norma hukum Satu Data dalam praktik birokrasi sehari-hari (Ramadhan et al., 2025).

Dalam kerangka OGD, pedoman dan kerangka hukum Satu Data Pekanbaru berperan strategis dalam membangun keseragaman prosedur pengelolaan data, baik dari aspek definisi, format, maupun indikator. Keseragaman ini menjadi prasyarat penting untuk menjamin keterbandingan data lintas sektor dan lintas waktu, serta mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data yang lebih akurat dan transparan (Sania & Nugroho, 2025). Tanpa penerapan pedoman hukum yang konsisten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2024, keterbukaan data berpotensi bersifat parsial dan tidak terintegrasi secara sistemik. Dengan demikian, temuan di Kota Pekanbaru memperkuat argumen bahwa regulasi OGD bersifat *necessary but not sufficient* untuk menjamin keterbukaan data yang berkualitas. Implikasi tata kelola dari kondisi ini adalah terjadinya fragmentasi data antarperangkat daerah (Muchsin, 2025), sehingga Satu Data Pekanbaru belum mampu berfungsi sebagai *single source of truth*. Tanpa kepatuhan yang konsisten terhadap standar data, keterbukaan data berpotensi bersifat simbolik dan hanya memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

2. Kemampuan Sistem Portal Web (*The Ability of the Web Portal System*)

Dilihat dari sisi teknologi, Portal Satu Data Pekanbaru telah menyediakan fungsi dasar keterbukaan data, seperti pencarian dan pengunduhan dataset. Namun, dalam kerangka teori OGD, kemampuan teknis portal seharusnya tidak hanya diukur dari keberadaan fitur, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mendukung interoperabilitas, keberlanjutan pembaruan data, dan pemanfaatan lintas sektor Sebagai infrastruktur digital tersebut (Nabiyeva & Wheeler, 2025), portal Satu Data Kota Pekanbaru telah menyediakan fungsi dasar diseminasi data terbuka. Fitur pencarian data, pengelompokan dataset berdasarkan perangkat daerah, serta fasilitas pengunduhan data dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara mandiri.

Kemampuan Sistem Portal Web Satu Data Pekanbaru masih berada pada tahap dasar penyediaan infrastruktur, belum berfungsi optimal sebagai sistem pengelolaan data terbuka yang aktif dan berkelanjutan. Jumlah dataset yang diunggah oleh perangkat daerah sangat terbatas dan tidak merata, di mana sebagian besar perangkat daerah belum mengunggah data sama sekali, sementara perangkat daerah yang telah berkontribusi pun umumnya hanya menyediakan satu dataset. Kondisi ini menunjukkan bahwa portal Satu Data belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media integrasi dan diseminasi data lintas sektor. Selain itu, keterbatasan juga terlihat jelas pada aspek konsistensi pembaruan data. Data yang ditampilkan di portal tidak diperbarui secara berkala, sehingga sebagian informasi kehilangan relevansinya terhadap kondisi terkini (Cerrly et al., 2025). Pembaruan dataset pada Portal Satu Data Pekanbaru belum dilakukan secara konsisten oleh perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah tidak memiliki catatan pembaruan data, sementara perangkat daerah yang telah mengunggah dataset memperlihatkan pola pembaruan yang bersifat serentak dan tidak berkelanjutan. Ketidakteraturan pembaruan ini menunjukkan bahwa sistem portal web belum terintegrasi secara optimal dengan sistem informasi

sektoral di lingkungan pemerintah daerah, dan masih mengandalkan proses unggah manual oleh masing-masing perangkat daerah (Hadie et al., 2025).

Ketergantungan pada proses manual tersebut kemudian berdampak pada kualitas informasi pendukung yang menyertai data, khususnya metadata. Metadata yang disediakan pada portal Satu Data Kota Pekanbaru sering kali tidak lengkap atau tidak seragam, sehingga pengguna kesulitan memahami konteks, cakupan, dan metode pengumpulan data. Ketidaklengkapan metadata ini mempersempit ruang pemanfaatan data, terutama untuk keperluan analisis kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kelengkapan metadata dataset pada portal Satu Data Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kelengkapan Metadata Dataset pada Portal Satu Data Pekanbaru Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Dataset		
		Metadata Lengkap	Metadata Tidak Lengkap	Metadata Parsial (Dataset tanpa Metadata)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	✓
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	✓	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	✓
4	Badan Pendapatan Daerah	-	✓	-
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	✓
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	✓
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	✓
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	✓
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	✓	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	✓
11	Dinas Kesehatan	-	✓	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	✓
13	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	✓
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	✓	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	✓
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	✓
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	✓
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	✓	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	✓
20	Dinas Pendidikan	-	✓	-
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	✓	-
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	✓	-
23	Dinas Perhubungan	-	✓	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	✓
25	Dinas Pertanahan	-	-	✓

26	Dinas Pertanian dan Perikanan	-	-	✓
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	✓
28	Dinas Sosial	-	✓	-
29	Dinas Tenaga Kerja	-	-	✓
30	Inspektorat	-	-	✓
31	Kecamatan Bina Widya	-	-	✓
32	Kecamatan Bukit Raya	-	-	✓
33	Kecamatan Kulim	-	-	✓
34	Kecamatan Lima Puluh	-	-	✓
35	Kecamatan Marpoyan Damai	-	-	✓
36	Kecamatan Payung Sekaki	-	-	✓
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-	✓
38	Kecamatan Rumbai	-	✓	-
39	Kecamatan Rumbai Barat	-	-	✓
40	Kecamatan Rumbai Timur	-	-	✓
41	Kecamatan Sail	-	-	✓
42	Kecamatan Senapelan	-	✓	-
43	Kecamatan Sukajadi	-	-	✓
44	Kecamatan Tenayan Raya	-	-	✓
45	Kecamatan Buah Madani	-	-	✓
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	✓
47	Sekretariat Daerah	-	-	✓
48	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	✓
Jumlah		0	13	35

Sumber: Satudata.pekanbaru.go.id, 2025

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dataset pada Portal Satu Data Pekanbaru masih disertai metadata yang tidak lengkap atau bahkan tanpa metadata sama sekali, sementara tidak ditemukan dataset dengan metadata yang benar-benar lengkap. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan bahwa kemampuan sistem portal web dalam memastikan standar informasi pendukung data, yang berimplikasi langsung pada rendahnya interoperabilitas data antarperangkat daerah (Mutiarin et al., 2024). Perbedaan format dan struktur data menyebabkan dataset sulit digabungkan atau diolah secara lintas sektor, sehingga portal Satu Data cenderung berfungsi sebagai etalase informasi yang bersifat statis dan belum berkembang menjadi sistem data terintegrasi yang mendukung pertukaran dan pemanfaatan data secara komprehensif. Interoperabilitas dataset tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Format Dataset pada Portal Satu Data Pekanbaru
Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Format Dataset		
		Format Terbuka (csv,json,xml,geojson, pdf,png, jpeg)	Format Tertutup (doc,xls, xlsx)	Tidak ada format
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	✓
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	✓ (csv, pdf)	✓ (xlsx)	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	✓
4	Badan Pendapatan Daerah	✓ (csv, pdf)	✓(xlsx)	-
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	✓
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	✓
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	✓
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	✓
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	✓ (csv, pdf)	✓(xlsx)	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	✓
11	Dinas Kesehatan	✓ (pdf)	✓(xlsx)	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	✓
13	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	-	-	✓
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	✓ (csv, pdf)	✓(xlsx)	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	✓
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	✓
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	✓
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓ (csv, pdf)	✓(xlsx)	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	✓
20	Dinas Pendidikan	✓ (pdf)	✓(xlsx)	-
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	✓ (pdf)	✓(xlsx)	-
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓ (pdf)	✓(xlsx)	-
23	Dinas Perhubungan	✓ (pdf)	✓(xlsx)	-
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	✓
25	Dinas Pertanahan	-	-	✓
26	Dinas Pertanian dan Perikanan	-	-	✓
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	✓
28	Dinas Sosial	✓ (csv, pdf)	✓ (xlsx)	-
29	Dinas Tenaga Kerja	-	-	✓
30	Inspektorat	-	-	✓
31	Kecamatan Bina Widya	-	-	✓
32	Kecamatan Bukit Raya	-	-	✓
33	Kecamatan Kulim	-	-	✓
34	Kecamatan Lima Puluh	-	-	✓

35	Kecamatan Marpoyan Damai	-	-	✓
36	Kecamatan Payung Sekaki	-	-	✓
37	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-	✓
38	Kecamatan Rumbai	✓ (csv, pdf)	✓ (xlsx)	-
39	Kecamatan Rumbai Barat	-	-	✓
40	Kecamatan Rumbai Timur	-	-	✓
41	Kecamatan Sail	-	-	✓
42	Kecamatan Senapelan	✓ (csv, pdf)	✓ (xlsx)	-
43	Kecamatan Sukajadi	-	-	✓
44	Kecamatan Tenayan Raya	-	-	✓
45	Kecamatan Buah Madani	-	-	✓
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	✓
47	Sekretariat Daerah	-	-	✓
48	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	✓
Jumlah		13	13	35

Sumber: Satudata.pekanbaru.go.id, 2025

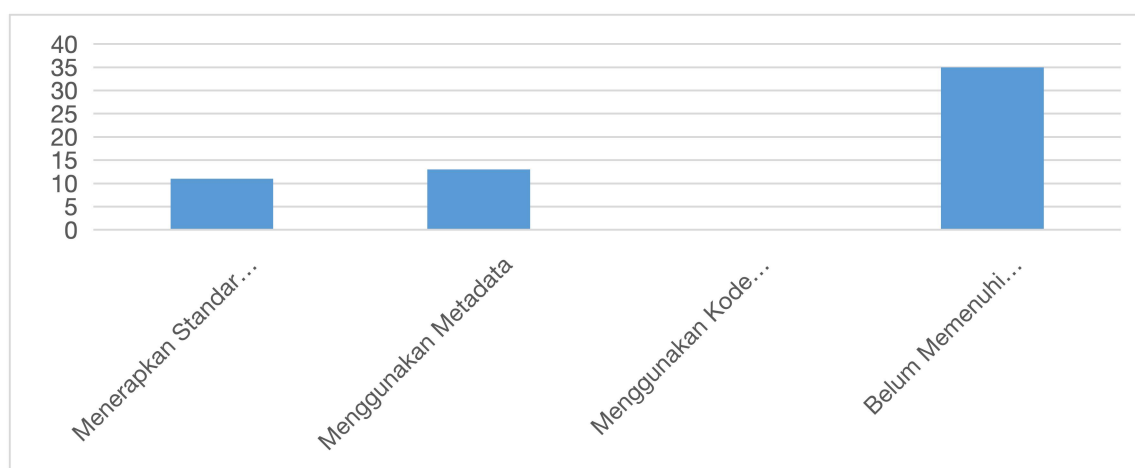
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa penggunaan format dataset pada Portal Satu Data Pekanbaru masih sangat terbatas dan belum konsisten dalam mendukung prinsip keterbukaan dan interoperabilitas data. Dari seluruh perangkat daerah yang tercantum, hanya 13 perangkat daerah yang menyediakan dataset, dan seluruhnya menggunakan gabungan format terbuka dan format tertutup, sedangkan 35 perangkat daerah lainnya belum menyediakan dataset dalam format apa pun. Pola ini menunjukkan bahwa penyediaan data belum mengikuti standar format terbuka secara konsisten, sehingga data yang tersedia masih sulit diolah dan digabungkan secara lintas sektor. Kondisi tersebut memengaruhi tingkat pemanfaatan data oleh pengguna eksternal. Meskipun data tersedia secara terbuka, keterbatasan kemampuan sistem portal web dalam menjamin kebaruan, kelengkapan, dan keterhubungan data menyebabkan rendahnya penggunaan data untuk analisis, pengawasan publik, maupun inovasi berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan data belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem yang mendukung pemanfaatan data secara efektif (Eli Apud Saepudin et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah dataset yang tersedia masih sangat terbatas, pembaruan data tidak berkelanjutan, metadata tidak lengkap, dan format data belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa portal Satu Data Pekanbaru lebih berfungsi sebagai etalase data statis daripada sebagai data *infrastructure* yang hidup dan terintegrasi. Hasil ini sejalan dengan temuan Wijaya et al. (2025) di Kota Denpasar dan Risky et al. (2025) di Kota Bandung, yang menunjukkan bahwa keberadaan portal data belum otomatis meningkatkan pemanfaatan data jika kualitas, kebaruan, dan interoperabilitasnya rendah. Dalam perspektif tata kelola, keterbatasan sistem portal web berdampak pada rendahnya nilai publik (*public value*) dari OGD. Data yang tidak mutakhir dan minim metadata sulit dimanfaatkan untuk analisis kebijakan, pengawasan publik, maupun inovasi berbasis data. Dengan demikian, OGD di Kota Pekanbaru masih berada

pada tahap *data disclosure* dan belum mencapai tahap *data use* sebagaimana ditekankan dalam konsep *New Open Government*.

3. Kemampuan dan Sikap Pemerintah terhadap Sumber Daya Manusia (*Government Human Resources Capabilities and Its Attitude*)

Aspek sumber daya manusia muncul sebagai faktor paling menentukan dalam implementasi Satu Data Pekanbaru. Walidata dan produsen data secara formal telah ditetapkan, namun kemampuan teknis dan pemahaman aparatur terhadap standar data masih timpang. Dalam teori OGD, kapasitas birokrasi dan sikap aparatur terhadap keterbukaan merupakan prasyarat utama agar data dapat dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik (Chen et al., 2023). Kapasitas aparatur dalam menjalankan peran tersebut masih menunjukkan variasi, terutama dalam pemahaman standar data dan tata kelola metadata yang dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



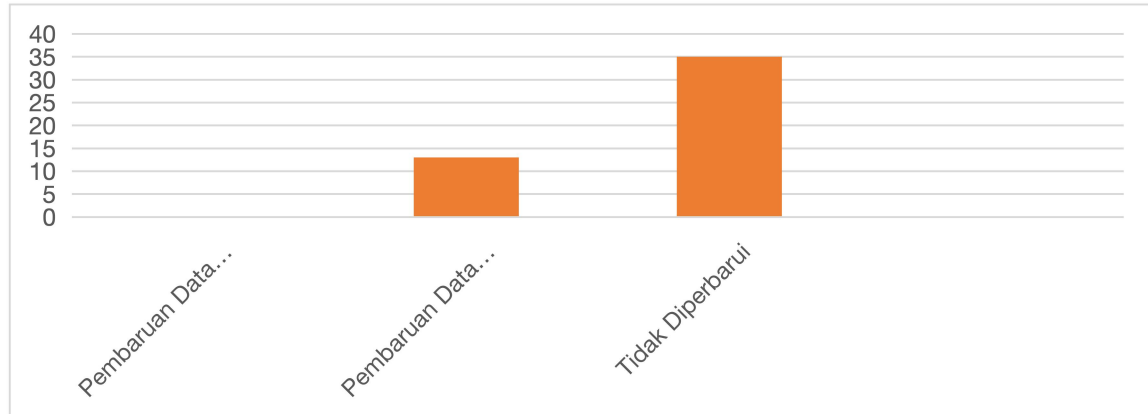
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Gambar 1. Diagram Tingkat Pemahaman Aparatur terhadap Standar Satu Data Tahun 2025

Gambar diagram di atas menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan standar Satu Data Pekanbaru, yang ditunjukkan oleh masih terbatasnya jumlah perangkat daerah yang memahami standar data dan metadata secara memadai serta belum diterapkannya kode referensi baku. Variasi kemampuan ini menunjukkan bahwa peran walidata dan produsen data belum dijalankan secara optimal di seluruh perangkat daerah, sehingga proses pengelolaan data masih berlangsung tidak seragam (Nuryana & Junaidi, 2025). Ketimpangan kemampuan ini berdampak pada kualitas OGD Kota Pekanbaru, di mana sebagian data belum sepenuhnya konsisten, mutakhir, dan mudah digunakan oleh publik.

Ketimpangan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan standar Satu Data Pekanbaru tidak hanya terlihat pada aspek konseptual, tetapi juga ditunjukkan dalam praktik pembaruan data. Tingkat pembaruan data oleh aparatur menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemahaman dan kemampuan teknis

tersebut diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan data sehari-hari melalui portal Satu Data Pekanbaru. Adapun tingkat pembaruan data oleh aparatur pemerintah daerah pada portal Satu Data Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Gambar 2. Diagram Tingkat Pembaruan Data oleh Aparatur Pemerintah Daerah pada Portal Satu Data Pekanbaru Tahun 2025

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pembaruan data oleh aparatur pemerintah daerah masih belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Sebagian perangkat daerah belum memperbarui data secara berkala, sehingga informasi yang tersedia kehilangan relevansi terhadap kondisi terkini. Ketidakteraturan pembaruan ini menunjukkan bahwa pengelolaan data belum sepenuhnya terintegrasi dalam rutinitas kerja aparatur, serta masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas teknis dan perbedaan prioritas kerja antarperangkat daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kebaruan dan keandalan data yang dipublikasikan (Sa'adah & Pramono, 2025).

Tidak hanya itu, kemampuan aparatur dalam konteks Satu Data Pekanbaru juga masih menghadapi keterbatasan pada aspek teknis pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi. Peran walidata cenderung dijalankan sebagai kewajiban administratif, sehingga fungsi pengendalian kualitas dan sinkronisasi data lintas sektor belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya menjadi prioritas strategis dalam implementasi Satu Data Pekanbaru (Irawan & Handayani, 2025). Sikap pemerintah daerah terhadap sumber daya manusia dalam Satu Data Pekanbaru ditunjukkan dari adanya komitmen kebijakan dan dukungan struktural terhadap keterbukaan data. Internalisasi nilai Satu Data dalam budaya kerja aparatur belum sepenuhnya terbentuk. Beban kerja birokratis, resistensi terhadap perubahan pola kerja, serta keterbatasan insentif berbasis kinerja data menunjukkan bahwa aparatur belum sepenuhnya terdorong untuk mengelola data secara proaktif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Ode et al. (2022) dan Mulyanto et al. (2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur dan budaya kerja sektoral

menjadi hambatan utama dalam integrasi data. Peran walidata di Kota Pekanbaru masih cenderung administratif, belum berkembang menjadi fungsi strategis pengendalian kualitas dan sinkronisasi data lintas sektor. Sikap aparatur terhadap keterbukaan data juga belum sepenuhnya proaktif, dipengaruhi oleh beban kerja birokratis dan minimnya insentif berbasis kinerja data. Implikasi tata kelola dari kondisi ini adalah terhambatnya transformasi OGD dari kebijakan teknokratis menjadi instrumen demokrasi data. Tanpa aparatur yang kompeten dan memiliki orientasi keterbukaan, OGD berisiko menjadi program formalistik yang tidak berdampak signifikan terhadap transparansi dan partisipasi public (Khurshid et al., 2024).

Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya menempatkan OGD sebagai bagian dari agenda *smart city* atau keterbukaan informasi publik, penelitian ini menawarkan *novelty* dengan menempatkan Satu Data Pekanbaru sebagai arena interaksi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas birokrasi dalam kerangka tata kelola data lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama OGD di tingkat kota bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau teknologi, melainkan pada lemahnya integrasi standar data dan kapasitas aparatur dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik pengelolaan data sehari-hari. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian OGD dengan menegaskan pentingnya dimensi *data governance readiness* di tingkat lokal, khususnya pada kota-kota yang belum memiliki ekosistem data yang matang. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi akademik agar penguatan OGD tidak hanya difokuskan pada pembangunan portal data, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparatur, insentif berbasis kinerja data, serta integrasi sistem informasi sektoral agar Satu Data dapat berfungsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Satu Data Pekanbaru belum optimal meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek kemampuan dan sikap sumber daya manusia. Ketimpangan pemahaman aparatur terhadap standar data, metadata, dan interoperabilitas, serta rendahnya konsistensi pembaruan data, berimplikasi pada kualitas OGD yang belum sepenuhnya konsisten, mutakhir, dan mudah dimanfaatkan oleh publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan data masih bersifat formal-administratif dan belum terintegrasi secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah berbasis data, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur, internalisasi nilai Satu Data dalam budaya organisasi, serta peningkatan integrasi sistem pengelolaan data untuk mencapai optimalisasi yang berkelanjutan.

Novelty penelitian ini terletak pada penempatan Satu Data Pekanbaru sebagai arena interaksi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas birokrasi dalam tata kelola data lokal, berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya memosisikan OGD dalam kerangka *smart city* atau keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama OGD di tingkat kota bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau teknologi, melainkan pada lemahnya integrasi standar data dan kapasitas aparatur dalam menerjemahkan norma

hukum ke dalam praktik pengelolaan data sehari-hari, sehingga menegaskan pentingnya dimensi *data governance readiness* dalam penguatan OGD di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 1–11.
- Aditio, B., Finaldi, A., & Asnil. (2025). Tantangan dan Strategi Data Driven Policy di Indonesia. *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), 53–62. <https://jkpjournals.kalselprov.go.id/index.php/jkp/article/view/452/206>
- Arsyi, A., Huroidhoh, S., Optafiyacha, S. A., & Fatkhuri. (2024). Analisis Portal Open Data KPU (opendata.kpu.go.id) dalam Mendukung Open Government di Indonesia pada Tahun 2024. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 118–132.
- Cerrly, As-syahrani, N. S., Nursahidin, & Sutarjo, M. (2025). Data Integration Through Cirebon One Data. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(7), 1241–1256. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15105>
- Chen, M., Cao, Y., & Liang, Y. (2023). Determinants of open Government Data Usage: Integrating Trust Theory and Social Cognitive Theory. *Government Information Quarterly*, 40(4), 10–18. <https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly>
- Danu, I. A. (2025). Strategi Kebijakan Penguatan Kualitas Statistik di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 20(2), 125–138. <https://jkpjournals.kalselprov.go.id/index.php/jkp/article/view/452/206>
- Dytihana, Z. A., Ramadhan, A. B., Sakhi, A. A. R., Syarofi, A., Fahlevvi, M. R., & Apriyansa, A. (2025). Strategi Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Big Data: Studi Kasus Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(2), 333–344.
- Eldo, D. H. A. P. (2025). Systematic Literature Review: Opportunities and Challenges of One Data Indonesia Implementation in the Regions. *World Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(5), 1–7. <file:///C:/Users/User/Downloads/WJMS262025+GP.pdf>
- Eli Apud Saepudin, Firlyn Solehatunnisa, Nurul Aida Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Emigawaty, & Syafrianto, A. (2024). Data Quality Analysis on Open Government Data Portals using ISO/IEC 25012:2008. *Journal of Information Systems and Informatics*, 6(2), 1317–1345. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i2.862>
- Hadie, A. N., Tahyudin, I., & Hariguna, T. (2025). Transformasi Portal Data Pemerintah di Indonesia dengan Large Language Model dan Retrieval-Augmented Generation: Tinjauan Pustaka Sistematis. *JPTI: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(12), 3644–3657. file:///C:/Users/User/Downloads/1241-1256_Cerrly_IJAR.pdf

- Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
- Hidayat, R. (2025). Digital Governance and Transparency: How Open Data Initiatives Enhance Government Accountability. *Journal of Governance and Regulation*, 14(3), 194–204. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i3art18>
- Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>
- Khaerani, T. R., & Samsu, M. K. A.-K. (2025). Open Government Data and Policy Innovation in Digital Governance. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 17(3), 48–61.
- Khurshid, M. M., Rashid, A., Yusof, S., Ahmad, R. W., & Shehzad, H. M. F. (2024). Open Government Data Intention-Adoption Behavioural Model for Public Sector Organisations: A Technological Innovation Perspective. *Emerging Science Journal*, 8(5), 1732–1763. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2024-08-05-04>
- Lao. (2019). *Trade Policy Review People's Democratic Republic* (W. T. Organization (ed.); Cetakan ke). World Trade Organization. https://www.google.co.id/books/edition/Trade_Policy_Review/v8IsbfWReyoC?hl=id&gbpv=0&bsq=e-government
- Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative Content Analysis-Framing the Analytical Process of Inductive Content Analysis to Develop a Sound Study Design. *Quality & Quantity*, 59(6), 5329–5349. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02220-9>
- Muchsin, M. (2025). Digital Governance dan Tantangan Integrasi Data Sektor Publik: Studi pada Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Papua. *JIIA: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(2), 1–9. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i2.7872>
- Mulyanto, A., Koniyo, M. H., & Yassin, R. M. T. (2022). Pembangunan Portal Open Data untuk Mendukung Open Government dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). *Jurnal Teknik*, 20(1), 31–43. <https://doi.org/10.37031/jt.v20i1.239>
- Mutiarin, D., Eldo, D. H. A. P., Sarofah, R., & Habibullah, A. (2024). Data Interoperability in Supporting Electronic-Based Governance Systems in the Local Government. *Corporate Law and Governance Review*, 6(4), 43–52. <https://doi.org/10.22495/clgrv6i4p4>
- Nabiyeva, G. N., & Wheeler, S. M. (2025). Open Government Data Portals and SDG 11: Lessons from 19 U.S. Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 17(22), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su172210405>
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383. <file:///C:/Users/User/Downloads/Nuryana+Fix+Publikasi.pdf>
- Ode, S., Firman, Syahrudin, F., & Regif, S. Y. (2022). Implementasi Portal Jakarta Open Data dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3),

- 223–228. <https://share.google/TiUE4KgUKWkDnGHEr>
- Rahman, K., Adni, D. F., & Nasution, M. A. T. P. (2024). Enhancing E-Government in Digital Transformation: Integrating Records Management and Digital Solutions in Pekanbaru, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 262–276.
- Rahmat, A. F., Nurmandi, A., Dewi, D. S. K., & Salahudin. (2019). Does The Government Effectively in Optimizing Open Data? Analysis " Jago Data " in Yogyakarta Municipality. *Journal of Governance*, 4(2), 136–155.
- Ramadhan, A., Suhendra, A., & Yohanitas, W. A. (2025). One Data Indonesia: A Retrospective Analysis of Data Interoperability in Declaring Regional Planning and Development. *International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science: Transformation and Innovation Research*, 21(2), 152–171. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i16.19169>
- Risky, M., Alamsyah, D. N., & Nuryanto, Y. (2025). Tata Kelola Open Government Data pada Data dan Informasi Publik Studi pada Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 13(3), 547–554. <https://share.google/nNRpmEYPv9jBmnOPo>
- Sa'adah, S., & Pramono, S. (2025). Open Government Data Maturity Assessment at the General Elections Commission of Indonesia Using the OD-MM Model. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(3), 324–334. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i3.4514>
- Sania, & Nugroho, H. S. (2025). Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan “LAPOR” Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 618–636. <file:///C:/Users/User/Downloads/Artikel+JPP+Vol+10+No+3+-+Sania.pdf>
- Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2025). O. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(3), 15–26. <https://jurnal.uit.ac.id/JPE/article/view/1463>
- Wijaya, K. A. S., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2025). Penerapan Open Government dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Publik di Kota Denpasar (Kajian Denpasar Open Data). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3507>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., Becker, M., & Müller, W. M. (2022). Open Government Data: A Systematic Literature Review of Empirical Research. *Electronic Markets*, 32(2), 2381–2404. <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00582-8>
- Zulfa, R. G., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Open Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 57–62.